

Surat Kabar Sebagai Media Kritik Sosial Di Indonesia 1966-1974

Iksan Rubeno¹, Mukhammad Shokheh²

¹⁻²Universitas Negeri Semarang

Email: : rubenoiksan@students.unnes.ac.id¹, shokheh@mail.unnes.ac.id²

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Abstract

This study is aimed to explain the role of newspapers as the media of social criticism during early political consolidation of the New Order until January 15th 1974 unrest. After Soekarno was ousted, Suharto rose into power as a temporary president in 1966, before being inaugurated as a second president of Indonesia in 1967 by MPRS. Opposition newspapers which were banned during Sukarno's regime, such as Indonesia Raya etc., are permitted to continue publications. Several newly-emerging newspapers such as Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, and Mimbar Demokrasi, participated in the 'short democratisation process' before the shift to authoritarian phase after January 15th 1974 unrest. This paper will discuss the transition process from the Guided Democracy era to the New Order, the consolidation process of the New Order, the role of newspapers as a medium of social criticism between 1966-1974, and the New Order's government response regarding social criticisms in the newspapers. The research method used in the preparation of this article includes a literature review through books and journals relevant to the research topic, as well as archival observation of newspapers, but limited to four newspapers: Indonesia Raya, Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, and Mimbar Demokrasi.

Keywords: Newspapers, Social Criticism, Old Order and New Order

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan peran surat kabar sebagai media kritik sosial pada masa awal konsolidasi politik Orde Baru hingga Peristiwa 15 Januari 1974. Setelah Soekarno dilengserkan, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden pada tahun 1966, sebelum dilantik oleh MPRS sebagai presiden Indonesia pada tahun 1967. Surat kabar oposisi yang dibredel pada rezim Soekarno, seperti Indonesia Raya dan lain-lain, dizinkan terbit kembali. Beberapa surat kabar baru seperti Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Indonesia Raya, dan Mimbar Demokrasi, berpartisipasi dalam 'demokratisasi berumur pendek' sebelum beralih ke fase otoritarianisme setelah kerusuhan 15 Januari 1974. Artikel ini akan membahas proses transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, proses konsolidasi Orde Baru, peran surat kabar sebagai media kritik sosial antara 1966-1974, dan respon pemerintah Orde Baru terhadap kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh berbagai badan pers. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu melalui kajian pustaka melalui buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian serta observasi arsip berupa surat kabar, namun dibatasi pada empat surat kabar seperti Indonesia Raya, Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, dan Mimbar Demokrasi.

Kata kunci: Surat Kabar, Kritik Sosial, Orde Lama dan Orde Baru

Copyright © 2025, Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah. All right reserved

PENDAHULUAN

Surat kabar adalah salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Dalam konteks sosial-politik, surat kabar juga merupakan salah satu media komunikasi politik, yang memiliki makna bahwa surat kabar dapat digunakan untuk menyebarluaskan muatan-muatan politik dari berbagai ideologi tertentu, termasuk dalam bentuk kritikan. Hal tersebut juga didukung oleh Njoto, pemimpin redaksi Harian Rakjat, yang memandang bahwa pers (termasuk surat kabar) adalah salah satu alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran (Njoto 1958, hal. 9).

Di Indonesia, surat kabar merupakan salah satu media massa dengan peminat terbanyak

di samping televisi dan radio antara tahun 1966-74, walaupun TVRI sudah muncul sejak tahun 1962, juga sebagai salah satu media propaganda pemerintah pada saat itu. Namun, sebelum peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada bulan Maret 1966, kebebasan pers terkekang oleh pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan berbagai regulasi, seperti 19 pasal yang harus ditandatangani oleh para insan pers, yaitu setiap badan penerbitan pers harus menyesuaikan diri dengan konsepsi politik Soekarno, seperti Manipol-USDEK, Nasakom, dan harus mendukung revolusi Indonesia (Surjomihardjo, 2002, hal. 181).

Setelah Soekarno tumbang dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, kebebasan pers kembali muncul walaupun ditemui batasan-batasan tertentu, dengan adanya UU Pokok Pers yang mulai berlaku pada tahun 1966. Pada masa itu, beberapa pers partai dan independen mulai diizinkan kembali untuk menerbitkan surat kabar mereka sendiri. Di samping itu, beberapa badan pers baru mulai bermunculan, seperti Kompas yang didirikan oleh PK Ojong dan Jacob Oetama. Adapun badan-badan penerbitan yang dikelola oleh mahasiswa (pers mahasiswa) mulai menerbitkan surat kabarnya sendiri, seperti Harian KAMI dan Mahasiswa Indonesia (Hill, 2011, hal. 36).

Harian-harian yang dikelola oleh mahasiswa dan pers oposisi biasanya memuat berbagai macam kritik kepada pemerintah, seperti kritik kasus korupsi dan kebobrokan ekonomi yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, yang selama ini ditutupi dengan jargon-jargon revolusioner. Tidak hanya itu, beberapa surat kabar juga mengkritisi kebobrokan-kebobrokan di masa konsolidasi Orde Baru seperti dugaan pemborosan yang dilakukan oleh Jenderal Ibnu Sutowo, direktur Pertamina pada awal Orde Baru, dugaan kekerasan taruna Akabri kepada mahasiswa ITB selama pertandingan sepak bola pada bulan Oktober 1970 (sekaligus mempertanyakan konsep manunggal ABRI dengan rakyat), kasus pemborosan dengan adanya pembangunan TMII yang dimulai pada tahun 1971, hingga kritik atas pembentukan asisten pribadi (Aspri) Soeharto yang mayoritas diisi oleh perwira-perwira kepercayaan Soeharto.

Namun pada akhirnya, pembredelan kembali terjadi setelah Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974, yang membuat pers politik kehilangan momentumnya. Beberapa surat kabar yang turut mendukung aksi mahasiswa tersebut serta vokal membuat sindiran terhadap pemerintah seperti harian Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, dan pers-pers mahasiswa seperti Harian KAMI, Mimbar Demokrasi, dan Mahasiswa Indonesia dicabut surat izin cetak dan terbitnya.

Penelitian ini tentunya sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, apalagi ada beberapa aspek yang cukup menarik untuk dikaji, seperti aspek kritis yang ditemui dalam surat kabar yang berdiri ketika konsolidasi Orde Baru, terutama dalam empat surat kabar yang menjadi fokus kajian ini. Aspek selanjutnya yang cukup menarik untuk dikaji dalam empat surat kabar tersebut adalah aspek kontrol sosial, sebagaimana teori pers tanggung jawab sosial, yang di mana, badan-badan pers harus ikut mengabdikan pada masyarakat dari berbagai kalangan.

Dalam konteks surat kabar sebagai media kritik di Indonesia pada tahun 1966 hingga 1974, surat kabar seperti Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi, Harian KAMI, dan Indonesia Raya, berfokus kepada kritisisme terhadap pemerintah Orde Baru mengenai berbagai isu yang sedang populer saat itu. Pada hakikatnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, konsolidasi Orde Baru, peran pers surat kabar sebagai *watchdog* dan media kritik, dan reaksi pemerintah terhadap

berkembangnya kritisisme dari surat kabar yang beredar saat itu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Gottschalk, 1986) Dalam pengumpulan sumber, sumber primer berupa surat kabar maupun arsip serupa lebih banyak digunakan, namun dibatasi pada surat kabar Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Indonesia Raya, dan Mimbar Demokrasi. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam proses penelitian meliputi buku-buku dan jurnal yang berkelindan dengan topik penelitian.

Sebelum pengumpulan sumber dilakukan, tentu harus melalui proses pemilihan topik terlebih dahulu. Pemilihan topik dibagi menjadi dua kedekatan, yaitu kedekatan intelektual dan emosional. Kedekatan intelektual sendiri berfokus pada ilmu bantu dalam penelitian sejarah. (Kuntowijoyo, 2005) Dalam penelitian ini, pendekatan intelektual yang digunakan adalah penggunaan ilmu-ilmu bantu seperti ilmu politik dan komunikasi untuk menganalisis pola komunikasi politik (dalam hal ini adalah kritik yang dilontarkan) melalui surat kabar oposisi yang beredar di masa akhir Demokrasi Terpimpin hingga awal Orde Baru.

Sementara, kedekatan emosional sendiri merujuk pada penyebab penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan karena surat kabar memiliki peran dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk kebebasan pers yang sudah menjadi tulang punggung dari sebuah negara demokratis, dalam hal ini adalah antara masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru hingga pembredelan surat kabar yang dianggap terlalu kritis kepada pemerintahan Orde Baru pasca kerusuhan 15 Januari 1974.

Untuk memperoleh sumber-sumber primer berupa surat kabar yang menjadi objek utama dalam kajian ini, peneliti menggunakan sarana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Salemba, Jakarta Pusat (lantai 7, layanan surat kabar langka) maupun melalui penelusuran tidak langsung yaitu dengan menggunakan layanan Khastara yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam mendapatkan sumber data berupa empat surat kabar (Indonesia Raya, Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, dan Mimbar Demokrasi).

Untuk memperoleh sumber-sumber kepustakaan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan sarana Perpustakaan Nasional RI Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (lantai 12-13, layanan baca di tempat dan lantai 14, layanan buku langka), Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro Tembalang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Sriwijaya, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah FISIP Universitas Negeri Semarang.

Setelah melalui proses pengumpulan sumber, tahap selanjutnya adalah verifikasi, untuk menguji keabsahan sumber. Karena sumber-sumber yang digunakan mayoritas berupa sumber-sumber tertulis seperti surat kabar, hal yang dilakukan adalah memeriksa validitas sumber dari berbagai substansi, seperti keaslian kertas yang digunakan hingga ejaan-ejaan yang sezaman dengan topik penelitian.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi dan historiografi. Interpretasi dan historiografi sendiri meliputi tahap deskripsi, narasi, dan analisis. (Sjamsuddin, 2007, hal. 123) Bedanya, dalam interpretasi, peneliti hanya menafsirkan sumber-sumber melalui sudut pandang tertentu, tergantung penelitian yang dilakukan. Sementara, tahap historiografi lebih menitikberatkan kepada penulisan ulang sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang telah

terkumpul dan diperiksa kredibilitasnya.

Dalam penelitian ini, interpretasi atau penafsiran dilakukan dengan menganalisis bentuk-bentuk kritik sosial yang dilontarkan dalam empat surat kabar yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, baik dalam bentuk tajuk wacana, karikatur, maupun berita utama (headline) sekaligus menelusuri makna kritikan tersebut secara mendalam sesuai konteks awal pemerintahan Orde Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru

Setelah kudeta yang terjadi pada malam 1 Oktober 1965 gagal, terjadi pembunuhan-pembunuhan kepada terduga simpatisan atau anggota PKI di berbagai daerah, yang dilakukan oleh kelompok Islam dan nasionalis/Marhaenis. Namun, pembantaian-pembantaian tersebut lebih dominan terjadi di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Meskipun ada keterkaitan antara PKI dengan anggota Gerakan 30 September yang menculik para perwira tinggi di Jakarta pada malam 1 Oktober, Soekarno justru menunjukkan sikap tenang, terutama ketika pernyataannya di MPRS pada tanggal 23 Oktober 1965 dan sidang paripurna kabinet di Bogor pada tanggal 6 November 1965 (Nuryanti, 2008, hal. 29). Intinya, dalam kedua sidang tersebut, Soekarno meminta agar semua kalangan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Soekarno, dalam sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, menganggap bahwa peristiwa yang terjadi pada malam 1 Oktober 1965 adalah persoalan politik, bukan persoalan TNI Angkatan Darat semata.

Pada tahun 1966, tepatnya pada tanggal 7 Januari, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta mulai turun ke jalan untuk menekan Bung Karno dan jajaran-jajaran kabinetnya untuk menurunkan harga-harga bahan pokok, termasuk tiket bus kota yang ikut naik sebagai imbas dari naiknya harga BBM. Menurut Soe Hok Gie, kenaikan harga bahan-bahan pokok ini sebagai salah satu upaya pemerintahan Bung Karno untuk mengalihkan isu kudeta yang dilancarkan oleh sebuah gerakan yang dinamai ‘Gerakan 30 September’ yang pada akhirnya dapat digagalkan. Pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa kembali melakukan long march ke Sekretariat Negara setelah berorasi dengan orasi-orasi anti-PKI dan G30S, yang dilanjutkan dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka ke Chaerul Saleh, yang dianggap sebagai ‘biang kerok’ dari kenaikan harga bahan-bahan pokok (Soe, 1989).

Demonstrasi-demonstrasi selanjutnya diwarnai dengan serangan-serangan sporadis kepada menteri-menteri kabinet Demokrasi Terpimpin, melalui umpanan-umpanan yang mewakili keluh-kesah mahasiswa yang ikut dalam aksi demonstrasi tersebut. Tidak hanya dialamatkan kepada para menteri, caci-maki tersebut juga dialamatkan kepada komandan Tjakrabirawa (Brigjen Sabur) dan Soekarno itu sendiri. Tentu saja, cacian-cacian tersebut dilontarkan bersamaan dengan seruan-seruan untuk membubarkan PKI, yang dianggap sebagai biang kerok gonjang-ganjing perpolitikan Indonesia saat itu.

Ketika Soekarno menyelenggarakan sidang paripurna kabinet di Istana Bogor pada tanggal 15 Januari 1966, para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, termasuk Universitas Indonesia, melakukan unjuk rasa besar-besaran dengan tuntutan-tuntutan yang sama, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia; retool Kabinet Dwikora yang sebagianya diisi oleh menteri-menteri yang berpihak kepada PKI atau Gerakan 30 September itu sendiri, seperti Soebandrio, yang kala itu menjabat sebagai menteri luar negeri; dan penurunan harga bahan-bahan pokok. Ketiga tuntutan tersebut dikenal pula sebagai ‘Tiga Tuntutan Rakyat’ atau Tritura. Soekarno kemudian mengeluarkan sebuah reaksi yang cukup keras terkait dengan aksi-

aksi sporadis yang dialamatkan kepadanya dan menteri-menterinya. Soekarno menuduh para mahasiswa yang menyelenggarakan unjuk rasa tidak tahu-menahu soal adat, karena para mahasiswa seringkali meneriakkan caciannya kepada para menteri dengan sebutan ‘menteri goblok’.

Puncak dari ketegangan politik yang berujung pada hilangnya popularitas Soekarno di mata rakyat terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, yang di mana, Soekarno melimpahkan seluruh urusan keamanan dalam negeri kepada Pangkostrad saat itu, yaitu Soeharto. Surat perintah ini, yang masih diragukan keabsahannya, diperkuat oleh MPRS menjadi sebuah Ketetapan MPRS no. 9 tahun 1966, pada tanggal 21 Juni 1966, sehingga Supersemar memiliki landasan legal formal bagi Soeharto untuk ‘memulihkan keamanan dan ketertiban dalam negeri’, yang berujung pada pembubaran PKI di seluruh wilayah Indonesia, yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS no. 25 tahun 1966 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1966. Dalam ketetapan tersebut, Partai Komunis Indonesia dilarang untuk menjalankan aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia karena ideologi partai (Marxisme-Leninisme atau sejenisnya) dianggap bertentangan dengan Pancasila (Samsudin, 2004).

Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya ketika Sidang Umum MPRS dengan nama ‘Nawaksara’, dengan memaparkan 10 poin pertanggungjawaban di sidang tersebut. Namun, dalam pidatonya itu, Soekarno tidak menyebutkan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’. Alhasil, pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS, yang diketuai oleh Jenderal AH. Nasution, salah satu sekutu Soeharto. Hal tersebut menjadikan sebuah batu loncatan bagi Soeharto untuk naik ke tampuk kekuasaan secara efektif, sekaligus mengawali periode Orde Baru, walaupun Soeharto baru dilantik sebagai presiden pada bulan Maret 1967.

Pada kurun waktu tahun 1967, pembersihan-pembersihan terus digencarkan, menyaraskan kepada perwira-perwira militer Soekarnois dan dituduh berafiliasi dengan PKI di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, dalam Mahkamah Militer Luar Biasa, para petinggi PKI dan menteri kabinet Soekarno yang dianggap ikut serta dalam G30S, seperti Sudisman, divonis mati pada bulan Juli 1967 dan dieksekusi di hadapan regu tembak pada tahun 1968. Nasib serupa juga dialami oleh Omar Dhani dan Subandrio, yang divonis mati 3 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1965, walaupun pada akhir hayat mereka, mereka tidak dieksekusi mati (Ricklefs, 2008).

Membangun Tatanan Orde Baru

Dalam meletakkan dasar-dasar Orde Baru, pemerintahan Soeharto mulai menggodok dasar-dasar Orde Baru, yang dianggap berbeda dengan Orde Lama. Jenderal AH. Nasution, ketua MPRS saat itu, mendefinisikan Orde Baru sebagai sebuah tatanan politik baru yang menekankan pada stabilitas politik dalam negeri, yang mengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial di dalam negeri dan mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi secara konsisten. Hal ini dipertegas dengan adanya pidato yang disampaikan oleh AH. Nasution, selaku Ketua MPRS pada saat itu, yang berjudul *Penegakan, Pembinaan, dan Pengisian Orde Baru*, yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 1967. Dalam pidato ini, Nasution menguraikan berbagai macam elemen, seperti hubungan militer dengan sipil, pemberantasan korupsi, pembinaan gerakan-gerakan mahasiswa, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan tatanan Orde Baru yang berbeda dengan Orde Lama yang penuh

kebobrokan dan gonjang-ganjang politik, beberapa langkah-langkah untuk mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi sebagaimana yang telah disinggung oleh Nasution, seperti restrukturisasi ekonomi dengan bantuan kaum teknokrat (*Mafia Berkeley*), legalisasi partai-partai yang pernah terlarang di era Demokrasi Terpimpin karena tendensi politik yang cenderung anti-Soekarno seperti PSI maupun Masjumi, pembubaran PKI maupun *onderbouw*nya, pemulihian kondisi kebebasan pers yang pernah hilang ketika Demokrasi Terpimpin, dengan adanya RUU Pokok Pers pada tahun 1966, yang mulai dibahas oleh DPR-GR di bawah pimpinan KH. Achmad Syaikh sebelum reses yang dimulai antara 1 Oktober hingga 23 Oktober 1966, khusus untuk menggodok RUU Pokok Pers yang dinanti-nanti oleh masyarakat dan para insan pers yang surat kabarnya pernah dibredel oleh pemerintahan Soekarno, termasuk Mochtar Lubis.

Dalam RUU Pokok Pers ini, atau nama resminya adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pers, terdapat beberapa aspek yang muncul dalam ketentuan tersebut, seperti definisi pers, fungsi dan tujuan pers nasional, wewenang, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan kebebasan pers. Dalam UU no. 11 tahun 1966, pada pasal 8 misalnya, para pemilik surat kabar tidak perlu mengurus Surat Izin Terbit (SIT) seperti periode sebelumnya, karena dalam ayat 1 pasal tersebut, ditegaskan bahwa ‘Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila’. Namun, kebebasan pers yang diperjuangkan oleh Orde Baru, tidak dirasakan oleh insan-insan pers yang memiliki pemahaman Marxisme-Leninisme atau yang setara dengan ideologi tersebut.

Beberapa pers surat kabar non-komunis yang dahulu dibredel ketika rezim Demokrasi Terpimpin, seperti harian *Merdeka*, *Pedoman*, *Abadi*, dan *Indonesia Raya*, diizinkan kembali untuk terbit. Di samping itu, beberapa surat kabar baru yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, seperti *Mahasiswa Indonesia*, *Mimbar Demokrasi*, *Indonesia Raya* dan *Harian KAMI*, mulai bermunculan. Pertumbuhan jumlah surat kabar yang beredar di lingkup nasional juga terus meningkat hingga pada tahun 1970an, (Syukur, 2012, hal. 265) dengan ditandai kenaikan oplah surat kabar di Jakarta menjadi 80 ribu eksemplar pada tahun 1970, dengan rincian jumlah oplah terbesar yaitu harian *Merdeka* dengan jumlah oplah sebanyak 82 ribu eksemplar, *Kompas* sebanyak 75 ribu, dan *Sinar Harapan* sebanyak 65 ribu eksemplar.

Surat Kabar dan Kritisisme di Masa Awal Orde Baru

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan sebagai kontrol terhadap sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat, dalam hal ini menggunakan media-media komunikasi massa seperti surat kabar. Bagi para insan pers, kritik sosial merupakan salah satu cara menjalankan fungsi pers pada umumnya, yaitu pers sebagai alat kontrol sosial. (Akbar, 1997) Namun, menurutnya, pers-pers yang kerap melontarkan kritik sosial ini, perlu menyalurkan kritikannya ala kadarnya sehingga tidak terjadi kerusuhan akibat berita yang diterbitkan dan mengandung unsur-unsur kritik sosial dibumbui dengan sentimen-sentimen tertentu.

Dalam teori pers libertarian, yang menjadi dasar dari adanya surat kabar yang beredar di masa awal Orde Baru, setiap badan pers berhak untuk menyuarakan pendapatnya sesuai dengan prinsip kebebasan individu, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendirikan badan penerbitan persnya sendiri. Teori ini sangat relevan dengan kehidupan pers surat kabar yang muncul ketika awal pemerintahan Orde Baru,

dengan adanya kritisisme yang muncul dalam berbagai macam surat kabar yang beredar.

Dengan jatuhnya Soekarno dari kursi kekuasaan, pemerintahan Orde Baru mengizinkan kembali surat kabar-surat kabar yang memiliki tendensi skeptis terhadap Demokrasi Terpimpin, atau dalam kasus lainnya, yaitu berkembangnya badan-badan pers yang baru, baik pers nasional maupun pers mahasiswa, seperti *Mahasiswa Indonesia* (edisi Jawa Barat maupun Jawa Tengah), *Harian KAMI*, dan *Mimbar Demokrasi*. Namun, untuk surat kabar *Mahasiswa Indonesia*, yang paling banyak jumlah oplahnya adalah *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat yang bermarkas di Bandung, menjadikan penerbit surat kabar ini sebagai salah satu surat kabar mahasiswa paling terkemuka pada saat itu. Apalagi, sebagian redaktur *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat merupakan anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Adapun *Harian KAMI* dan *Mimbar Demokrasi*, keduanya adalah surat kabar resmi yang diterbitkan oleh IPMI. (Siregar, 1983).

Surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat yang berbasis di Bandung, misalnya, semenjak tahun-tahun awal Orde Baru, melontarkan serangan-serangan tajam kepada Soekarno dan rezim Demokrasi Terpimpin secara sporadis dan didukung oleh pihak militer. Surat kabar mingguan tersebut secara kontinu mengeluarkan pendapat-pendapat yang menyerang Soekarno dan pemerintahannya, sekaligus menggambarkan Soekarno sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas rezim Demokrasi Terpimpin yang korup, sekaligus sosok yang menghalangi reformasi ekonomi di Indonesia di tengah carut-marutnya keadaan perekonomian di Indonesia saat itu. (Raillon, Tamara, & Simanjuntak, 1985, hal. 47).

Surat kabar yang dibidani oleh Hariman Siregar dan Rachmat Tolleng ini berdiri pada tahun 1966 dan mulai menerbitkan edisi pertamanya pada tahun yang sama. Surat kabar ini menggunakan format tabloid dalam penerbitannya (30 x 45 cm) dan memiliki tebal sebesar 8 halaman, ditambah 2 halaman tambahan untuk iklan, sehingga total halaman yang dimiliki sebanyak 10 halaman.

Surat kabar *Mahasiswa Indonesia* tidak hanya menyerang Soekarno secara sporadis melalui Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi, melainkan turut serta dalam kampanye-kampanye antikorupsi. Sebagai contoh, surat kabar ini juga mengkritik mismanajemen di BULOG (Badan Urusan Logistik) yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi ABRI itu. Isu-isu lainnya yang disorot oleh surat kabar mingguan tersebut, adalah penguasaan Kementerian Agama oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan berbagai isu korupsi maupun dugaan pemborosan pada tahun 1970an, yang tentunya melahirkan Gerakan Anti Korupsi yang kemudian berkembang menjadi Komite Anti Korupsi. Gerakan ini juga kemudian menginspirasi aksi demonstrasi melawan wacana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas pada tahun 1971.

Dengan menggunakan motto *Pembina Insan Pancasila*, surat kabar ini tentunya mendapat dukungan dari pihak militer, salah satunya Jenderal AH. Nasution yang selamat dari percobaan kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September. Bahkan, Nasution juga mendorong direksi yang bertugas untuk berani menyampaikan kebenaran dan keadilan tanpa pamrih, demi tercapainya Orde Baru yang lebih baik dibandingkan Orde Lama, sesuai pidatonya yang dikutip oleh surat kabar Mahasiswa Indonesia dalam terbitan tanggal 6 November 1966 ini, dengan judul 'Menegakkan Orde Baru: Siapakah Orla Itu?'.

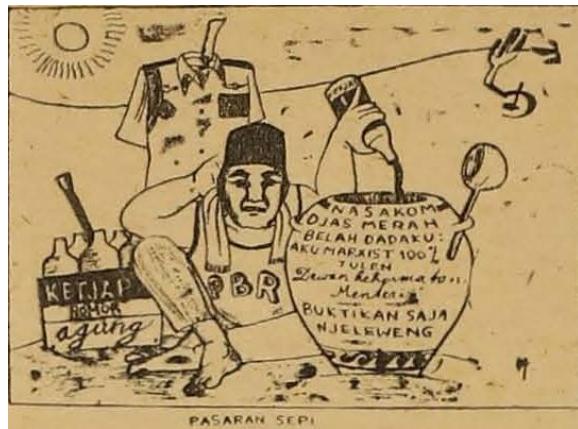
Pada awalnya, surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* berfokus pada isu yang berkaitan dengan kondisi politik Indonesia setelah kegagalan peristiwa G30S, seperti kritikan-kritikan terhadap komunisme hingga peristiwa pembersihan dalam berbagai instansi dari

unsur-unsur PKI. Dalam terbitan 17 April 1966, misalnya, surat kabar ini fokus pada proses persidangan para perwira ABRI yang dituduh terlibat G30S dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, atau biasa disebut sebagai Mahmilub. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *Mahasiswa Indonesia* fokus pada kritisisme kepada rezim Orde Baru, seperti isu penyelewengan di PT. Mantrust, PT. Berdikari, kasus korupsi Bulog, hingga isu pemborosan yang dilakukan Ibnu Sutowo sehingga Pertamina mengalami defisit.



Gambar 1. Foto-foto yang diterbitkan dalam surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* di masa awal penerbitannya, tepatnya pada tanggal 17 April 1966.

Foto di atas merujuk pada proses persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dengan para perwira yang memiliki sangkut paut dengan peristiwa G30S, seperti Sujono yang dituduh terlibat dalam kasus G30S karena dianggap memberi ruang pada pasukan penculik yang menggunakan Lubang Buaya, yang letaknya tak jauh dari pangkalan udara Halim. Adapun gaya kritikan yang disampaikan oleh surat kabar tersebut, biasanya sebuah isu yang dijadikan sebagai bahan kritikan dimasukkan ke dalam sebuah berita utama (*headline*) seperti di harian *Indonesia Raya*. Pada tahun 1966, ketika awal terbit, *Mahasiswa Indonesia* menyindir konsepsi-konsepsi Soekarno yang pernah digembar-gemborkannya, seperti gagasannya tentang Nasakom, dalam bentuk karikatur.



Gambar 2. Karikatur *Mahasiswa Indonesia* yang terbit pada tanggal 16 Oktober 1966, beberapa bulan setelah keluarnya Supersemar.

Berlanjut ke tahun 1967, surat kabar *Mahasiswa Indonesia* mengkritisi gaya hidup mewah dan pemborosan-pemborosan yang dilakukan oleh direktur utama Pertamina saat itu, yaitu Ibnu Sutowo dalam terbitan bulan Juni 1969, dalam bentuk artikel laporan, dengan mengutip berbagai sumber, seperti *Newsweek* yang juga menyoroti gaya hidup mewah dari seorang petinggi perusahaan negara tersebut. Dalam surat kabar ini, kehidupan mewah Ibnu Sutowo digambarkan dengan dinding kantor yang dihiasi dengan kayu jati, minuman bersoda *Coca-Cola* yang tidak semua orang mampu membelinya pada saat itu, rumahnya yang dijaga oleh pengawal bersenjata, dan hadiah pernikahannya berupa 18 perahu *yacht*. Laporan ini menyoroti perilaku Ibnu Sutowo yang cenderung konsumtif, di saat Indonesia baru pulih dari gonjang-ganjing politik dan ekonomi.

**DJENDERAL MINJAK
DISOROT**

Bandung, (MI)—. Setelah beberapa waktu lamanya 'didiamkan', akhir² ini PN Pertamina dan Direkturnya Djenderal Ibnu Sutowo kembali mendapat sorotan tajam oleh pers.

Bila pers dalam negeri jang di pelopori oleh harian Operasi telah mengungkapkan tentang kemungkinan adanya permainan dalam pembelian 21 kapal tanker oleh Pertamina, iain lagi hafnia dengan majalah *Newsweek*.

Majalah ini dalam edisiannya tgl. 16 Djuni 1969 telah menurunkan suatu tulisan jang berjudul "The Oil General" atau "Djenderal Minjak" dimana dilukiskan tentang kehidupan pribadi dari Djenderal Ibnu Sutowo dan tentang kekayaan minjak Indonesia jang dikatakannya merupakan daja penari jang paling panas bagi penyebor² (minjak) dunia.

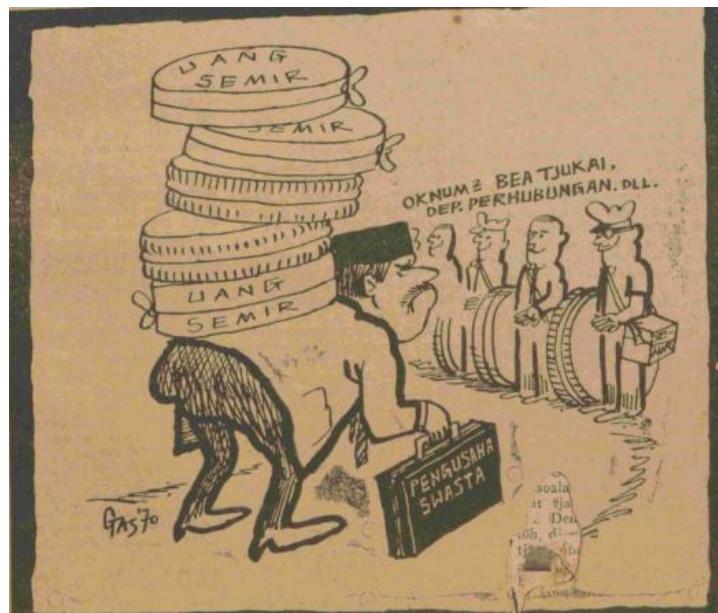
DJENDERAL JANG GEMERLAPAN

Newsweek memulai tulisannya, "Segala sesuatu ditakdir Djenderal Ibnu Sutowo dari Indonesia adalah tjiemerlang dan gemerlap, an. "Is spotless and gleaming", kata Newsweek. Pakaian seragan

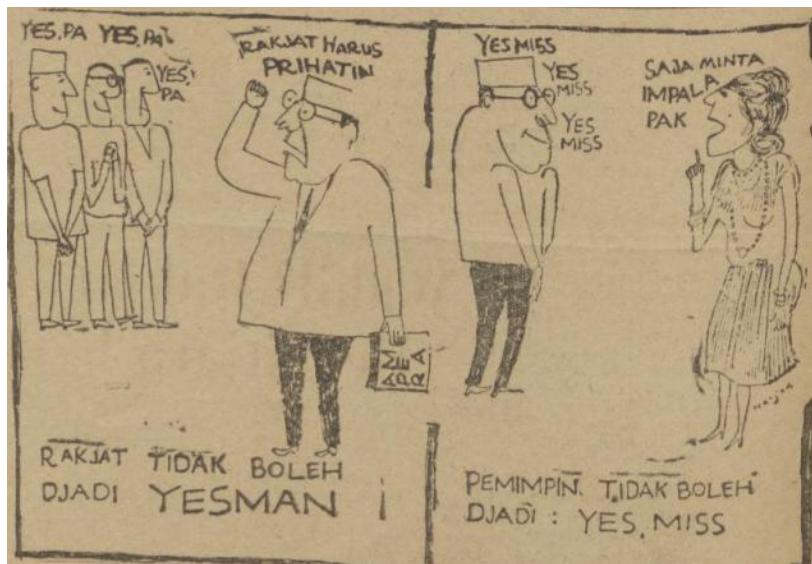
DJENDERAL IBNU SUTOWO

54 tahun ini tampil kemuka. Dia adalah Presiden Direktur

Gambar 2. Laporan dari mingguan *Mahasiswa Indonesia* pada bulan Juli 1969 yang menyoroti gaya hidup mewah dari Direktur Pertamina saat itu, yaitu Ibnu Sutowo



Gambar 2. Karikatur dari mingguan *Mahasiswa Indonesia* yang mengkritisi praktik suap di lingkungan instansi negara, seperti Bea Cukai dan Departemen Perhubungan, pada bulan Juni 1970



Gambar 3. Karikatur dari mingguan *Mahasiswa Indonesia* yang mengkritisi mental asal bapak senang (ABS) dari para pejabat negara.

Tidak hanya itu, mingguan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat juga aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah maupun skandal korupsi yang melibatkan instansi pemerintahan, seperti skandal kasus suap yang seringkali menghantui oknum pejabat di Bea Cukai dan Departemen Perhubungan dalam bentuk karikatur, dalam terbitan bulan Juni 1970.

Surat kabar yang memiliki tendensi serupa dengan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat adalah *Mimbar Demokrasi*, yang tentu didirikan oleh figur-figrur yang pernah mengelola *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat. Surat kabar ini mulai terbit pada tanggal 30 September 1966, dan secara pamornya, jauh lebih kecil dibandingkan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat, meskipun sama-sama bermarkas di Bandung. Namun, surat kabar ini berhenti beroperasi pada tahun 1968 karena keterbatasan biaya untuk mengelola badan pers tersebut

dan kurangnya profesionalitas orang-orang yang mengelola mingguan *Mimbar Demokrasi*, dan keluarnya pengasuh surat kabar ini karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dibandingkan dengan surat kabar *Mahasiswa Indonesia* maupun *Harian KAMI*, porsi *Mimbar Demokrasi* lebih banyak dalam membahas isu-isu politik dan pendidikan, sementara porsi yang membahas isu-isu hukum dan pemasangan iklan jauh lebih sedikit.

Surat kabar ini juga termasuk sebagai surat kabar yang cukup kritis, meskipun hanya aktif sekitar 2 tahun. Terdapat berbagai macam isu yang diangkat oleh surat kabar ini, seperti skandal korupsi dan penyelewengan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Indonesia, dan juga masalah kenaikan harga pangan yang memicu berbagai macam penolakan dari masyarakat.



Gambar 4. Karikatur dari surat kabar *Mimbar Demokrasi* tanggal 4 Februari 1968, yang menyindir ketimpangan standar hidup dan manipulasi yang dilakukan pejabat korup.

Adapun *Harian KAMI*, yang merupakan organ dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ini, juga memiliki tendensi kritisisme kepada pemerintah yang cukup tajam. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia, KAMI didukung oleh pihak militer untuk menumbangkan kekuasaan Soekarno, mengingat organisasi ini berakar dari Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu) yang didirikan oleh Subchan ZE dari Nahdlatul Ulama dan Harry Tjan Silalahi dari Partai Katolik. Keduanya memiliki tendensi politik yang sama, yaitu menginginkan agar dalang dari Gerakan 30 September dihukum seberat-beratnya. (Crouch, 1980).

Harian KAMI dimiliki oleh Nono Anwar Makarim, dan memiliki haluan anti-komunisme serta aktif menyampaikan kritisisme kepada rezim Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto. Surat kabar milik KAMI ini pernah menjadi rumah bagi jurnalis-jurnalis terkenal seperti Goenawan Mohamad, yang kemudian mendirikan badan penerbitannya sendiri, yaitu majalah *Tempo* pada tahun 1971. Layaknya surat kabar yang beredar pada saat itu, seperti *Mahasiswa Indonesia* milik Rachmat Tolleng hingga harian *Indonesia Raya* milik Mochtar Lubis, *Harian KAMI* juga ikut menyuarakan kritik terhadap isu-isu ekonomi, politik, bahkan sosial-budaya, bahkan ikut serta dalam membongkar skandal korupsi yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin hingga masa-masa awal Orde Baru.

Menurut pengamatan Siregar dalam bukunya *Pers Mahasiswa Indonesia: patah tumbuh hilang berganti*, apabila dibandingkan dengan surat kabar sejenis, termasuk *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat dan *Mimbar Demokrasi*, Sebagai contoh, dalam *Harian KAMI* terbitan tanggal 1 November 1969, yang mengkritisi adanya pemerasan bagi para pedagang kecil oleh para preman yang dibantu oleh pengelola pasar dalam bentuk karikatur. Karikatur tersebut

menggambarkan para pedagang kecil yang diinjak oleh oknum yang berbadan gemuk, berperawakan kekar, menyandang senjata tajam berupa pisau sambil memegang uang hasil pemerasan, dengan mengambil latar di salah satu pasar yang terkenal di Jakarta, yaitu Pasar Senen. Karikatur ini muncul di halaman muka (*headline*), seperti apa yang dilakukan oleh harian Indonesia Raya.

Selain itu, *Harian KAMI* juga menyoroti dugaan penyelewengan yang melibatkan lembaga pemerintahan daerah dan sebuah perusahaan asal Jepang, yaitu Mitsubishi ketika proses pembagian bantuan berupa alat-alat pertanian dan pupuk kepada para petani di Cianjur. Paket bantuan itu, yang memiliki harga 13.5 ribu rupiah (kurs saat itu) dengan luas tanah sebesar 17.500 hektar. Paket bantuan untuk para petani ini, menurut laporan yang dimuat di *Harian KAMI* terbitan tanggal 24 Februari 1970, diduga telah diselewengkan oleh perangkat daerah setempat dan petugas yang memberikan bantuan tersebut. Dugaan penyelewengan ini semakin parah dengan ditemukannya beberapa tanda tangan palsu dan adanya nama-nama petani yang meninggal dunia atau yang tidak tinggal di desa tersebut dalam daftar penerima, atas arahan Jawatan Pertanian yang memerintahkan kepala unitnya untuk melakukan penyelewengan tersebut.

Indikasi lain yang menunjukkan penyelewengan bantuan ini adalah para lurah yang ada di Cianjur, terbukti menyelewengkan bantuan dengan dalih pembangunan infrastruktur desa seperti jembatan yang menggunakan dana hasil penyelewengan bantuan. Contoh lainnya, dalam *Harian KAMI* terbitan tanggal 2 Maret 1970, sukses mengungkap dugaan kasus korupsi proyek pembuatan pabrik baja di Lampung, sekaligus memberitakan bagaimana proses penyelidikan kasus korupsi tersebut. Apalagi, kejadian ini terungkap setelah terbentuknya komisi pengusutan dan penyelidikan tindak pidana korupsi pertama di Indonesia, yaitu Komisi Empat yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 31 Januari 1970.

Berdasarkan berita tersebut, dugaan penyelewengan ini melibatkan perusahaan pemilik pabrik baja yaitu PT. Way Lunic, sebuah perusahaan patungan antara pemerintah pusat dengan nama 'Proyek Baja Lampung' dengan perusahaan swasta bernama PT. Desa Kota yang berbasis di Jakarta. Perusahaan patungan yang mengelola pabrik baja ini pada awalnya mendapatkan modal awal sebanyak 30 juta rupiah (berdasarkan kurs saat itu) dan 70 persen beban operasionalnya dibebankan kepada perusahaan swasta yang dimaksud. Dengan adanya pabrik ini, diharapkan akan menyerap 40 orang tenaga kerja yang akan bekerja untuk membuat alat-alat pertanian. Namun, pada akhir tahun pembukaan 1969, setelah berjalan beberapa tahun, PT ini mencatatkan kas kosong, dengan alasan minimnya pendapatan. Akibatnya, para buruh pabrik yang bekerja di pabrik baja tersebut tidak mendapatkan gaji dan THR yang berjumlah 800 ribu rupiah (kurs saat itu).



Gambar 5. Laporan dari *Harian KAMI* pada tanggal 2 Maret 1970 yang mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan sebuah perusahaan dari Jakarta dengan pemerintah pusat melalui Dirjen Perindustrian Dasar Jakarta.

Isu-isu lain yang menjadi fokus dari kritisisme *Harian KAMI* terhadap pemerintah adalah isu terkait dengan masalah mahalnya harga tepung terigu sebagai salah satu komoditas yang seringkali diburu oleh masyarakat pada saat itu. Dalam laporan yang dimuat dalam laman muka (*headline*) surat kabar tersebut pada tanggal 27 Oktober 1971 dengan judul 'Djika THR Rp 1000,-', surat kabar ini menyoroti masalah tata kelola dalam pendistribusian tepung terigu yang pada saat itu, PT. Bogasari ditunjuk sebagai satu-satunya pabrik tepung terigu yang berwenang dalam produksi dan pemasaran tepung di masa Orde Baru, apalagi, pemilik dari Bogasari (Sudono Salim) memiliki ikatan dengan Presiden Soeharto.

Masalah tata kelola ini, yaitu penimbunan tepung terigu ini ketika sedang *surplus*, menyebabkan harga tepung di Jakarta dan sekitarnya mengalami kenaikan, dari 65 rupiah ke 70 rupiah. Apabila dibandingkan dengan tepung terigu yang diimpor dari Amerika Serikat dan Australia, yang mutunya kurang baik karena diproses lebih lama dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai di Indonesia, tepung terigu milik Bogasari lebih baik dalam hal mutu. Dengan demikian, terjadi sebuah kongkalikong yang melibatkan pemerintah dan Bogasari, sehingga merugikan para pedagang grosir maupun eceran, yang menerima keuntungan yang tidak seimbang antara produsen dan distributor.

Dalam edisi yang sama, surat kabar ini juga mengkritisi Ali Murtopo, yang dinilai tidak paham tentang hak asasi manusia. Kritik ini dilontarkan setelah Ali Murtopo menganggap bahwa diskusi-diskusi tentang nasib tahanan politik (tapol) yang sedang dipenjara di Pulau Buru hanyalah sebuah dalih untuk membela 'racun', yang dimaksud 'racun' tersebut adalah komunis dan PKI, yang telah dilarang dalam TAP MPRS no. XXV/1966. Padahal, Ali Murtopo, asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, pernah ikut bersama aktivis mahasiswa pada tahun 1966. Hal ini tentunya disorot oleh dua aktivis hak asasi manusia, seperti Poncke Princen yang menanggapi pidato Ali Murtopo dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di Aula UI ini.

Menurutnya, diskusi tentang tahanan politik di Buru adalah sebuah upaya normalisasi orde hukum yang sempat kacau di masa Demokrasi Terpimpin. Justru, racun yang ditentang oleh Princen, adalah seseorang yang memiliki asumsi bahwa negara ini diatur oleh beberapa orang saja, bukan oleh undang-undang yang berlaku. Adapun Adnan Buyung Nasution, juga

menyoroti pidato kontroversial ini. Ia mengharapkan agar pernyataan tersebut hanyalah sebuah salah ucapan. Kalaupun apa yang disampaikannya cukup serius, maka para aktivis pendukung Orde Baru harus memberikan jawaban yang setimpal dengan pernyataan tersebut. Karena, masalah ini sangat serius karena menyangkut nilai-nilai diri sendiri, baik sebagai manusia maupun pejuang. Namun, dalam hal ini, Buyung juga mengklasifikasikan berbagai macam pejuang, ada yang pejuang yang hanya ingin mencari jabatan dan ada pula pejuang yang tulus dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.



Gambar 6. Laporan dari *Harian KAMI* tanggal 27 Oktober 1971 yang menyoroti penimbunan tepung terigu yang menyebabkan harga tepung terigu naik dan kongkalikong antara pemerintah dengan PT. Bogasari



Gambar 7. Tanggapan *Harian KAMI* terkait dengan pernyataan Ali Murtopo yang dianggap kontroversial, yang mencederai demokrasi Indonesia di masa awal Orde Baru. Berita ini dimuat pada tanggal 27 Oktober 1971.

Terkait dengan surat kabar yang sering memberikan kritisisme terhadap penguasa, surat kabar *Indonesia Raya* dapat dikatakan konsisten dan pedas dalam menyampaikan kritik. Di antara surat kabar yang beredar pada masa awal kekuasaan Orde Baru, surat kabar milik *Indonesia Raya* usianya jauh lebih tua, karena surat kabar ini berdiri pada tahun 1949, ketika Indonesia sedang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya melawan Belanda. Selama periode Demokrasi Liberal hingga ditutup pada tahun 1958, *Indonesia Raya* tetap menjadi media kritisisme kepada pemerintahan yang berkuasa.

Bahkan, setelah dihidupkan kembali pada tahun 1968, surat kabar harian besutan Mochtar Lubis ini kembali menyuarakan kritik kepada rezim Soeharto yang baru berdiri beberapa tahun, baik melalui laporan-laporan, tajuk wacana (*editorial*), maupun karikatur, meski pada awalnya, aspek kritisisme yang disampaikan tidak sepedas surat kabar milik mahasiswa yang beredar saat itu, justru surat kabar ini awalnya menyuarakan dukungannya terhadap rezim Soeharto.

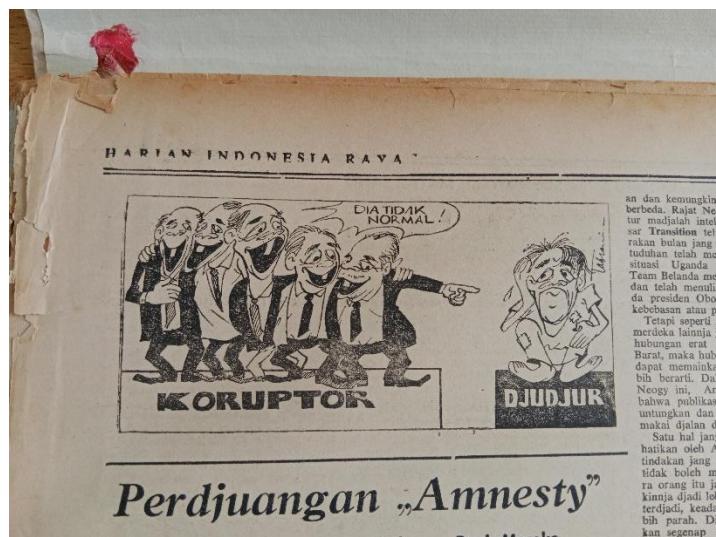
Adapun isu-isu yang diangkat di surat kabar harian *Indonesia Raya* sangat beragam, tergantung tanggal terbitnya. Dalam terbitan tanggal 1 November 1968, misalnya, surat kabar ini memuat laporan yang berisi tentang dugaan manipulasi distribusi beras ke pasar-pasar di seluruh Indonesia yang dilakukan para oknum pejabat di Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang kemudian berubah menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog). Penyelewengan ini, menurut laporan dari surat kabar tersebut, melibatkan beberapa pengusaha dari kalangan Tionghoa yang memegang monopoli atas urusan distribusi beras. *Modus operandi* yang dilakukan antara ‘cukong’ ini dengan para pejabat yang ada di Bulog, yaitu dengan menjual beras-beras yang sudah rusak, yang tentunya harganya jauh lebih murah daripada beras-beras berkualitas bagus. Hal ini tentunya menguntungkan para pejabat Bulog dan ‘cukong’ tersebut, namun merugikan konsumen.



Gambar 8. Laporan dari surat kabar harian *Indonesia Raya* tanggal 1 November 1968, yang membahas tentang manipulator beras yang ada di dalam tubuh Bulog dan ‘kongkalikong’ antara Bulog dengan ‘cukong’ yang memonopoli distribusi beras

Dalam surat kabar harian *Indonesia Raya* terbitan tanggal 16 November 1968, masalah penyelewengan beras yang terjadi di Bulog diangkat kembali, dengan mempertanyakan komitmen pemerintahan Orde Baru untuk memberantas korupsi dengan judul ‘Kapan Manipulator Bulog Ditindak?’ sekaligus menyertakan data distribusi yang dilakukan oleh Bulog yang diperoleh dari wartawannya sendiri. Menurut laporan tersebut, hanya 32 persen dari 50 persen yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.

Masih di tahun yang sama, pada tanggal yang sama pula, harian *Indonesia Raya* juga membuat kritik yang tajam kepada tim pemberantasan korupsi yang dianggap tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Komisi Empat diresmikan pada tanggal 31 Januari 1970, pemerintahan Orde Baru sudah melakukan berbagai upaya untuk mengusut dan menyelidiki perkara korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di era Orde Lama maupun awal Orde Baru, meskipun tim tersebut dianggap berkebalikan dengan semangat pemberantasan korupsi yang telah digaungkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, dalam hal ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) no. 228 tahun 1967 tentang Tim Pemberantasan Korupsi. Padahal, ide pembentukan TPK berasal dari kalangan jurnalis dan aktivis mahasiswa Angkatan 66.



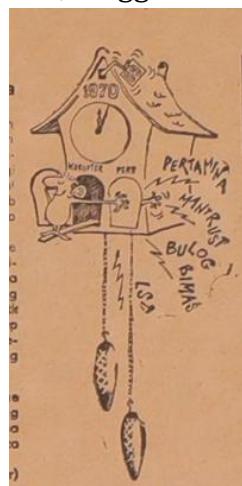
Gambar 9. Karikatur di surat kabar harian *Indonesia Raya* terbitan 30 Oktober 1968, menyindir pejabat-pejabat korup, kemungkinan besar karikatur ini dibuat seiring dengan mandulnya fungsi Tim Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Presiden Soeharto

Beranjak ke tahun 1969, surat kabar harian *Indonesia Raya* juga menyinggung dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang ada di Bea Cukai. Dalam *Indonesia Raya* terbitan tanggal 4 Januari 1969, surat kabar ini mengungkap bagaimana penyelewengan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok ketika proses impor obat nyamuk. Ketika proses impor tersebut, sang pemilik perusahaan perdagangan yang melakukan impor mengaku telah membayarkan bea kepada petugas bea cukai, namun sesuai dengan bagian *headline*-nya, jumlah bea yang dibayar berbeda-beda, antara 21 juta rupiah atau 26 juta, yang menguatkan indikasi dugaan manipulasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Hal itu juga disinggung dalam sebuah tajuk wacana yang berjudul 'Rencana Pembangunan Lima Tahun' yang dimuat dalam halaman kedua dari surat kabar tersebut.



Gambar 10. Karikatur di surat kabar harian *Indonesia Raya* terbitan 30 Oktober 1968, menyindir pejabat-pejabat korup, kemungkinan besar karikatur ini dibuat seiring dengan mandulnya fungsi Tim Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Presiden Soeharto

Masalah lainnya yang menjadi *concern* bagi surat kabar ini adalah dugaan penyelewengan pula, yang terjadi dalam sebuah perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi, yaitu Pertamina. Di awal bulan Januari 1970, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1970. Sebuah potongan berita yang menunjukkan bahwa Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo yang dinilai 'sulit ditertibkan', berdasarkan kesaksian Prof. Soemantri Brodjonegoro pada bulan Desember 1969. Dalam terbitan tersebut, karikatur yang menggambarkan pembungkaman pers dalam mengungkap berbagai macam kasus korupsi dan penyelewengan, seperti penyelewengan di Bulog, Mantrust, hingga Pertamina.



Gambar 11. Karikatur di surat kabar harian *Indonesia Raya* terbitan 30 Oktober 1968, menyindir pejabat-pejabat korup, kemungkinan besar karikatur ini dibuat seiring dengan mandulnya fungsi Tim Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Presiden Soeharto

Respon Pemerintah Orde Baru: Dari Toleransi ke Pembredelan

Pada awalnya, pemerintah Orde Baru tidak menanggapi dengan serius adanya kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan kepada rezim dalam berbagai permasalahan. Sebagaimana kata Ali Murtopo dalam menanggapi kebebasan pers, yaitu 'Kebebasan pers adalah mahkota bagi Orde Baru', pemerintah tidak mau menindak para badan pers secara berlebihan, meskipun

kritik-kritik yang ditujukan kepada pemerintah Orde Baru disampaikan dengan tajam dengan berbagai sindiran dalam bentuk-bentuk yang beragam, mulai dari laporan jurnalistik hingga karikatur.

Namun, ada juga indikasi-indikasi yang mengarah kepada intervensi pemerintah Orde Baru untuk mengaburkan fakta-fakta terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh aparat militer di Purwodadi, Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 1968. Sebagai contoh, pada bulan Maret 1969, yang di mana, para wartawan *Indonesia Raya* yang dikirim oleh Mochtar Lubis ke Purwodadi, diikuti oleh aparat pemerintah dan tidak berhasil mengungkap fakta dari pembantaian tersebut. Surat kabar ini hanya mendapatkan keterangan dari Panglima Divisi Diponegoro yang turut serta dalam pembantaian ini, yang tentu menyangkal adanya pembantaian yang terjadi di Purwodadi ini, yang menargetkan orang-orang yang dituduh terlibat PKI.

Sebuah momen serupa juga terjadi pada tahun yang sama, namun hal ini disebabkan oleh gencarnya surat kabar *Indonesia Raya* dalam membongkar skandal korupsi Pertamina yang berada di bawah pimpinan Ibnu Sutowo. Kendati surat kabar lainnya seperti *Harian KAMI*, *Mahasiswa Indonesia*, *Kompas*, hingga *Sinar Harapan*, mendukung langkah Mochtar Lubis, namun surat kabar *Merdeka* dan *Angkatan Bersendjata* kompak menolak dukungan tersebut. BM. Diah, selaku pemimpin redaksi *Merdeka*, menuduh Mochtar Lubis dibayar oleh ‘asing’ untuk menyudutkan Pertamina.

Laporan dari surat kabar *Indonesia Raya* ini kemudian memicu demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa, menuntut Soeharto untuk menuntaskan masalah korupsi di Pertamina. Bahkan, Mochtar Lubis pernah didatangi seorang asisten Ibnu Sutowo untuk menawarkan konsesi minyak kepadanya. Apalagi, beliau juga seorang wirausahawan, di samping posisinya sebagai wartawan senior. Beliau kemudian menafsirkan upaya ini untuk menggembosi usahanya dalam melakukan investigasi secara independen untuk mengorek dugaan korupsi Pertamina dan Ibnu Sutowo itu sendiri.

Pada bulan Januari 1970, menanggapi laporan-laporan dari surat kabar yang mayoritas menyoroti isu-isu korupsi dan penyelewengan dalam berbagai lembaga negara maupun BUMN pada saat itu, seperti Bulog, dan dipertegas dengan adanya gerakan-gerakan mahasiswa untuk menuntut Soeharto berkomitmen untuk memberantas korupsi, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat untuk menyelidiki dan menuntaskan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Komisi Empat sendiri terdiri atas Wilopo yang menjadi ketua dari komisi ini, diikuti oleh Mohammad Hatta dan beberapa tokoh bangsa lainnya termasuk IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, dan WZ. Johannes.

Pembentukan Komisi Empat, sebagai salah satu langkah dari pemerintah Orde Baru untuk mengintensifkan pemberantasan korupsi, ternyata disetujui oleh mahasiswa. Namun, pada kenyataannya, mempertanyakan kinerja komisi tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi (KAK) menyahut, ‘Tanpa Komisi Empat dan tanpa menunggu lima bulan, kami pun sudah tahu itu (soal korupsi yang ada)’. Namun, respon serupa yang dilontarkan oleh Mohammad Hatta, bahwa korupsi sudah mengakar dan membudaya di Indonesia, justru diberikan sambutan oleh mahasiswa (Hasibuan dkk, 2011).

Adanya Komisi Empat, sebagaimana yang diinginkan oleh mahasiswa, memiliki tugas yang cukup berat, yaitu untuk menuntaskan dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi baik yang terjadi di era Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya dugaan korupsi Roeslan Abdoelgani,

penyelewengan Dana Revolusi, dugaan mismanajemen di Bulog, kasus dugaan penyelewangan Ibnu Sutowo di Pertamina, dan lain-lain. Akan tetapi, upaya pemberantasan korupsi pada saat itu tidak menjadi *concern* dalam pemerintahan Soeharto, sehingga muncul upaya sabotase dalam proses kerja Komisi Empat.

Memasuki tahun 1971, beberapa surat kabar, termasuk *Indonesia Raya* dan *Harian KAMI* diikuti oleh para mahasiswa melakukan protes atas pembangunan miniatur Indonesia Indah, yang selanjutnya disebut dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Gerakan tersebut dinamai sebagai ‘Gerakan Anti Mini’, yang ditujukan untuk menggagalkan pembangunan sebuah taman miniatur yang digagas oleh Tien Soeharto. Adapun alasan dari penolakan pembangunan ini, salah satunya adalah kondisi ekonomi yang tidak sepadan dengan anggaran yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar 10.5 milyar rupiah berdasarkan kurs saat itu.

Selain itu, proyek ini juga dianggap menghidupkan warisan Soekarno, yaitu gagasan terkait dengan proyek mercusuar yang dibangun dengan mengorbankan kondisi perekonomian rakyat. Akan tetapi, kritisisme dari berbagai pihak, khususnya sebagian pers yang menyindir dan mengkritisi pembangunan miniatur Indonesia Indah, dianggap sebagai angin lalu, bahkan disikapi dengan represifitas aparat. Pada tanggal 7 Januari 1972, Kopkamtib mengeluarkan larangan terhadap seluruh aksi mahasiswa di jalan. Hal ini tentu menjadi sebuah pembuka dari tindakan represif yang dilakukan pemerintah Orde Baru, meskipun belum sampai muncul ancaman pembredelan (Fatah, 2010).

KESIMPULAN

Surat kabar memainkan peran penting sebagai medium kritik sosial pada fase awal konsolidasi politik Orde Baru, khususnya dalam rentang waktu 1966–1974. Pada periode transisi dari Demokrasi Terpimpin menuju Orde Baru, pers memperoleh ruang relatif terbuka untuk menyalurkan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan, kebijakan ekonomi, dan praktik politik yang dinilai menyimpang dari cita-cita reformasi pasca-1965. Surat kabar seperti *Indonesia Raya*, *Harian KAMI*, Mahasiswa Indonesia, dan Mimbar Demokrasi tampil sebagai aktor sosial-politik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan menjadi saluran artikulasi kegelisahan masyarakat, khususnya kelompok intelektual dan mahasiswa.

Namun, kebebasan pers tersebut bersifat sementara dan situasional. Seiring menguatnya posisi politik Soeharto dan upaya konsolidasi kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru menunjukkan kecenderungan represif terhadap kritik yang dianggap mengancam stabilitas politik. Peristiwa 15 Januari 1974 menjadi titik balik yang menandai berakhirnya fase “*demokratisasi berumur pendek*” dan awal pengetatan kontrol negara terhadap pers. Dengan demikian, pers pada periode ini mencerminkan dinamika relasi kuasa antara negara dan masyarakat, sekaligus memperlihatkan bagaimana kritik sosial melalui surat kabar dibatasi oleh kepentingan stabilitas dan legitimasi rezim Orde Baru.

Referensi

- Akbar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. *Unisia*, 17(32), 44–51.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol17.iss32.art5>.
- Crouch, H. A. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Fatah, E. S. (2010). Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik

- Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok. Jakarta: Burung Merak Press.
- Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.
- Hasibuan dkk. (2011). Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. Jakarta: Gramedia.
- Hill, D. T. (2011). Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. (2011). Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Pustaka.
- Nasution, A. H. (1967). Penegakan, Pembinaan, dan Pengisian Orde Baru. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
- Njoto. (1958). Pers dan Massa. Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Nuryanti, R. (2008). Tragedi Sukarno: Dari Kudeta sampai Kematiannya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Raillon, F., Tamara, N., & Simanjuntak, E. S. (1985). Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Samsudin. (2004). Mengapa G30S/PKI gagal?: Suatu analisis. Yayasan Obor Indonesia.
- Siregar, A. E. (1983). Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soe, H. G. (1989). Catatan Seorang Demonstran. Jakarta: LP3ES.
- Steele, J. E. (2005). Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto's Indonesia. Equinox Publishing.
- Surjomihardjo, A. (2002). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. Mimbar Pendidikan, 3(2), 113-136.
- Syukur, A., dkk. (2012). Indonesia dalam arus sejarah: Orde baru dan reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.